



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

| | |
|-------------|--|
| Judul | : Menteri PPN/Bappenas Beberkan Konsep Blue Economy untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi |
| Tanggal | : Rabu, 07 September 2022 |
| Surat Kabar | : Kontan |
| Halaman | : - |

Reporter: **Vendy Yhulia Susanto** | Editor: **Noverius Laoli**

KONTAN.CO.ID - **JAKARTA** Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sedang menyusun peta jalan (*roadmap*) ekonomi biru (*blue economy*). *Blue economy* rencananya akan menjadi salah satu sumber penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa menyampaikan, pada November 2021 Indonesia telah melaunching *framework blue economy*.

Dia mengatakan, terdapat dua pilar *blue economy*. Pertama, mendorong peningkatan sektor seperti perikanan tangkap industri pengolah pangan, pariwisata, dan perdagangan perikanan. Kedua, memperluas sektor yang sedang berkembang seperti energi terbarukan, ekonomi kelautan, riset, inovasi.

"Kementerian PPN/Bappenas saat ini sedang menyiapkan *blue economy roadmap*," ujar Suharso dalam *Side Event The Development of Indonesia's Blue Economy Roadmap* di Kabupaten Belitung, Rabu (7/9).

Suharso menyebut, *roadmap blue economy* diantaranya akan memuat strategi dan inisiatif kunci untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus pelestarian ekosistem laut. Serta mendorong kolaborasi antar sektor dalam implementasinya.

"Ekonomi biru bertujuan meningkatkan nilai tambah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi secara lebih inklusif dan berkelanjutan," kata Suharso.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, peta jalan *blue economy* disusun dalam rangka transformasi ekonomi. Dalam proses penyusunan, Bappenas menjaring semacam masukan dari berbagai *stakeholder* mulai dari kementerian/lembaga, United Nations (perserikatan bangsa bangsa/PBB) dan LSM.

"Rencananya *blue economy roadmap* akan kami luncurkan awal tahun depan pada saat Indonesia menjadi Chairman atau Ketua ASEAN 2023," kata Amalia.

Amalia menerangkan, pada akhir 2020 Menteri PPN/Kepala Bappenas meluncurkan *blue economy development framework* untuk menyamakan persepsi semua bahwa *blue economy* akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.

Lalu, pada 2021 *blue economy* menjadi pembahasan dari *development working group* negara-negara yang tergabung dalam G20. *Blue economy* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses *recovery* dan *resilient*.

"Di tahun 2023 *blue economy* ini akan kita bawa menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam pembahasan (forum) ASEAN 2023," ucap Amalia.

Amalia menyampaikan, *blue economy* akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. *Blue economy* juga akan masuk ke dalam bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi ekonomi Indonesia.

Transformasi ekonomi Indonesia ini akan menjadi *backbone* dari arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.

"Kita mau pertumbuhan (ekonomi) rata-rata 6% supaya bisa segera lepas, keluar dari *middle income trap* sebelum 100

tahun kemerdekaan Indonesia," ujar Amalia.

Amalia menyatakan, penerapan *blue economy* nantinya akan berjalan beriringan dengan ekonomi hijau. Ekonomi hijau akan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Lalu, *blue economy* atau ekonomi biru akan mendorong lebih inklusif, juga *sustanaibel*, dan pada saat yang bersamaan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Kita mau *balancing*, ekonomi, sosial dan lingkungan, 3 aspek ini gimana caranya (tumbuh), blue ekonomi salah satu caranya, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tapi kita juga inklusif dan sustanaible," ucap Amalia.

Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Bappenas, Leonardo A A Teguh Sambodo menambahkan, rancangan dari *blue economy development roadmap* ini juga sudah mempertimbangkan amanat peraturan perundang-undangan dan juga dokumen dokumen yang sudah dihasilkan oleh beberapa kementerian terkait.

Seperti kementerian kelautan dan perikanan, kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi, serta mempertimbangkan bagaimana secara global *blue economy* juga dikembangkan.

"Beberapa sub sektor unggulan juga nanti akan ditetapkan sehingga ini akan menjadi driver untuk memulai dari penerapan *blue economy*," ucap Leonardo.

Leonardo menyebut, bagian yang juga akan menyertai pengembangan blue ekonomi *roadmap* ini adalah rencana Bappenas yang akan menginisiasi *blue financing*.

Bappenas saat ini tengah mempersiapkan *framework* tersebut. Kemudian mendesain skema pendanaan untuk mendukung penerapan *blue economy*. Ia mengatakan, skema pendanaan *blue economy* akan didorong melalui *creative financing*.

"*Creative financing*, ada yang bisa *blended financing*, kalo *blended financing* ada yang *crowdfunding* tapi kita melihat karena pemerintah yang meluncurkan, berarti ada platform yang lebih formal, apakah itu melalui obligasi dan sebagainya yang memang bisa dimanfaatkan," terang Leonardo.